



**PEMERINTAH**  
KOTA SAWAHLUNTO

# RENCANA KERJA

**TAHUN 2024**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



Disdukcapil Sawahlunto



Dukcapil Sawahlunto



dukcapil@sawahluntkota.go.id



Pengaduan 085271699843

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto telah dapat disusun dengan baik dan tepat pada waktunya.

Rencana Kerja disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun mendatang.

Ucapan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta berperan aktif dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Mudah-mudahan Rencana Kerja ini bisa memberikan manfaat yang baik bagi Aparatur Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto.

Sawahlunto, Agustus 2023

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangakt Daerah .....	10
2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan .....	12
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan .....	14
3.1 Telahaan Terhadap Kebijaka Nasional .....	14
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	17
3.3 Program dan Kegiatan.....	18
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	21
Bab IV Penutup .....	23

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto .....	7
Tabel 2.2 Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pen- catatan Sipil Kota Sawahlunto .....	10
Tabel 2.3 Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepen- tingan tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Sawahlunto .....	13
Tabel 3.2 Target kinerja, tujuan dan sasaran tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawah- lunto .....	18
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto.....	19
Tabel 4.1 Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 Kota Sawah- Lunto.....	21

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dijalankan oleh Perangkat Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menyusun Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 memuat Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas untuk mencapai sasaran yang diinginkan pada tahun 2024. Prioritas pembangunan daerah didasarkan pada pertimbangan dan acuan :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
2. Bersifat penting dan mendesak untuk dilaksanakan
3. Bersifat realitis dan dapat dilaksanakan
4. Merupakan tugas dan kewenangan pemerintah daerah
5. Program dan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan

### **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
12. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan SIAK;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk non Permanen;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan serta Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto sebagai berikut :

#### **1. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto adalah sebagai dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk periode 1 tahun

#### **2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Sawahlunto adalah untuk menjabarkan tujuan, kebijakan, program dan kegiatan dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **BAB I      Pendahuluan**

##### **1.1. Latar Belakang**

##### **1.2. Landasan Hukum**

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

##### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB II      Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Kerja Tahun Lalu**

##### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Mencakup uraian dan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, serta kemajuan yang telah dicapai atas

target kinerja yang diharapkan menurut Renstra masing-masing Perangkat Daerah, mengetahui kendala dan tingkat pemanfaatan potensi yang ada serta menentukan langkah-langkah atau kebijakan yang diperlukan pada Rencana Kerja Tahun 2024

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memaparkan kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan terhadap permasalahan aktual/penting yang dihadapi masyarakat sesuai kewenangan Perangkat Daerah masing-masing, beserta dampak dan peluang yang dimiliki Perangkat Daerah serta rekomendasi kebijakan program kegiatan dan sub kegiatan untuk mengatasi permasalahan.

## 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.

Memaparkan kajian penyusunan Renja dengan usulan-usulan desa/kelurahan, kecamatan, Perangkat Daerah lain maupun pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pelayanan bidang Dukcapil yang disampaikan melalui forum Perangkat Daerah.

# BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

## 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Menyajikan telaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

## 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Termasuk didalamnya penjelasan mengenai capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan baik yang sesuai dengan target, melebihi target maupun yang tidak sesuai dengan target.

# BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan rumusan rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025

**BAB V    Penutup**

- A. Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- B. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- C. Rencana tindak lanjut

## BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Realisasi Renstra mencakup uraian dan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja tahun lalu dengan renstra masing-masing Perangkat Daerah.

1. Pada DPA awal tahun 2022 program dan kegiatan berjumlah 4 program, 13 kegiatan dan 21 sub kegiatan yang tertuang di dalam DPA awal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2021, secara fisik 4 program, 13 kegiatan dan 21 sub kegiatan terlaksana 100%. Selanjutnya dilihat dari realisasi keuangan, capaian program secara total sebesar 92,69% dengan rincian pada belanja operasi terealisasi sebesar 92,63% dan pada belanja modal terealisasi sebesar 95.75% dengan kisaran rata-rata capaian per program antara 75.38% sampai dengan 93,07% dan capaian kegiatan rata-rata berkisar antara 75.38% sampai 99.49% sedangkan capaian per sub kegiatan berkisar antara 55,05 % sampai 99.49%. Untuk Fisik program dapat mencapai target karena adanya peran aktif seluruh pegawai dan PPTK, adanya inovasi-inovasi baru dalam kegiatan pelayanan serta adanya kontrol yang baik dari pimpinan.

Rincian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Rencana Kerja 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023  
Kota Sawahlunto

Kode	Unsur / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Ranjo Perangkat Daerah Tahun 2023)	Pencapaian Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Ranjo Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Ranjo Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2 12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2 12 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2 12 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah								
2 12 01 2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah tersedianya Gaji ASN yang dibayarkan	20	0	13	14	107.69	14	28	1.40
2 12 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2 12 01 2.05 02		Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakelan Temu yang diadakan	1	0	45	38	84.44	38	76	76.00
2 12 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat daerah							0	
2 12 01 2.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12		12	12	100.00	12	24	2.00
2 12 01 2.06 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya atk, alat dan bahan komputer serta alat dan bahan kebersihan	1	0	12	12	100.00	0	12	12.00
2 12 01 2.06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1	0	12	12	100.00	12	24	24.00
2 12 01 2.06 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	1	0	12	12	100.00	12	24	24.00
2 12 01 2.06 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya buku umum referensi	1	0	0	0	0.00	0	0	0.00
2 12 01 2.06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10	0	12	12	100.00	12	24	2.40
2 12 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	1	0	2	2	100.00	2	4	4.00
2 12 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2 12 01 2.08 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket pengiriman yang disediakan	12	0	12	12	100.00	12	24	2.00
			Jumlah Material 10.000 yang disediakan		0	12	12	100.00	100	112	9.33
2 12 01 2.08 02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik, air, dan telepon yang dibayar (bulan)	12	0	12	12	100.00	12	24	2.00
			Jumlah tagihan air yang dibayarkan		0	12	12	100.00	12	24	2.00
			Jumlah tagihan listrik yang dibayarkan		0	12	12	100.00	12	24	2.00
			Jumlah tagihan telephone yang dibayarkan		0	12	12	100.00	12	24	2.00
2 12 01 2.08 04		Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tersedianya Gaji Jasa Pegawai Non ASN yang Dibayarkan	12	0	12	13	108.33	12	26	2.08
2 12 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2 12 01 2.09 01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak kendaraan perorangan/dinas atau kendaraan dinas jabatan	14	0	12	12	100.00	12	24	1.71
2 12 01 2.09 09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah frekwensi pemeliharaan Aset Tetap lainnya (bulan)	1	0	12	9	75.00	0	9	9.00
			Jumlah frekwensi pemeliharaan taman (bulan)		0	12	10	83.33	0	10	10.00
			Rehab bangunan dan pagar		0	1	0	0.00	0	0	0.00
			Tersedianya / dapat digunakan hasil rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		0	0	0	0.00	12	12	12.00
2 12 01 2.09 10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	10	0	11	11	100.00	11	22	2.20
2 12 02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK									
2 12 02 2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
2 12 02 2.01 03		Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Masalah kependuduk yang diselesaikan (laporan)	50	0	12	12	100.00	50	62	1.24
2 12 02 2.01 04		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen pendaftaran yang diterbitkan	12	0	5.000	11.406	228.12	12	11.418	962
2 12 02 2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk									
2 12 02 2.02 02		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain blanko KTP-El, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Tersedianya Tonner, Ribbon, clearing kit	2	0	11	11	100.00	0	11	5.50
2 12 02 2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk									
2 12 02 2.03 01		Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (laporan)	12	0	12	84	700.00	84	7.00	
2 12 02 2.03 02		Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Pelayanan keliling yang dilakukan	8	0	15	36	233.33	36	4.38	
2 12 02 2.03 08		Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan data yang akurat	1	0	48	20	41.67	20	20.00	
2 12 03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL									
2 12 03 2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil									
2 12 03 2.02 01		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Pasangan Suami Istri yang belum tercatat Pengikahannya di Pemerintah terfasilitasi sidang lebarnya	1	0	60	36	58.33	36	36.00	
2 12 04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									
2 12 04 2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Yang Di sajikan	1	0	3	8	266.67	0	8	8.00
5 04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
5 04 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5 04 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
5 04 01 2.05 09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jml aparatur yang mengikuti diklat formal/umum dan teknis (orang)	5	0	15	12	80.00	15	27	5.40

Terhadap Renstra Perangkat Daerah, dari 2 sasaran strategis dan 2 indikator sasaran yang dilaksanakan di tahun 2022, indikator sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sasaran 1 terealisasi dengan indeks “ B” sedangkan Sasaran 2 terealisasi sebesar 108,87 %. Hal ini terjadi karena adanya kegiatan pelayanan keliling dan perekaman ke sekolah-sekolah, melalui petugas registrasi yang ada di Desa/Kelurahan, Sosialisasi Kebijakan Adminduk di beberapa Desa/Kelurahan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Jenis pelayanan yang harus diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi target nasional ada 5 indikator yang harus dipenuhi dalam pelayanan publik yaitu perekaman dan penerbitan KTP El, penerbitan akta kelahiran penduduk 0-17 tahun, Penerbitan Kartu Identitas Anak, penerbitan akta kelahiran semua penduduk dan penerbitan akta kematian.

Pada capaian kinerja sasaran 2 “Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan” dengan indikator sasaran Persentase Penduduk yang memiliki Dokumen Kependudukan sesuai dengan skala prioritas yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama diolah dari data :

1. Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki KTP dibagi jumlah wajib KTP dikalikan bobot yang telah ditetapkan (20).
2. Persentase Penduduk (0 – 17) yang memiliki Akta Kelahiran dibagi total jumlah Penduduk Usia 0 - 17 Tahun dikalikan bobot yang telah ditetapkan (20).
3. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran dikali total jumlah penduduk dikalikan bobot yang telah ditetapkan (20).
4. Persentase Penerbitan Akta Kematian dibagi jumlah kematian yang dilaporkan dikalikan bobot yang telah ditetapkan (20).
5. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dibagi jumlah anak Usia 0-16 tahun dikalikan bobot yang telah ditetapkan (20).

Berikut capaian dari masing - masing item tersebut diatas :

1. Pada tahun 2022 target Penduduk wajib KTP yang memiliki KTP (sudah perekaman) sebesar 100% tercapai sebesar 98,29% dari wajib KTP yang berjumlah 48.915 orang (*data DKB Semester II tahun 2022*) dan telah melaksanakan perekaman biometrik dan memiliki KTP El sebanyak 48.079 orang. Belum tercapainya target pada indikator ini disebabkan karena adanya sebagian masyarakat yang tidak berdomisili di kota Sawahlunto sementara terdaftar sebagai penduduk kota Sawahlunto, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto adalah pemanggilan penduduk yang belum perekaman dan belum memiliki/mencetak KTP el melalui kegiatan perekaman biometrik door to door kerumah-rumah khusus penduduk lansia dan disabilitas di desa dan Kelurahan se Kota Sawahlunto, melaksanakan event service, melaksanakan pelayanan keliling ke desa/kelurahan se Kota Sawahlunto, serta perekaman ke sekolah-sekolah menengah lanjutan atas.
2. Capaian “Persentase Penduduk (0 – 17) yang memiliki akta kelahiran” pada tahun 2022 baru tercapai sebesar 93.42% (DKB Semester II Tahun 2022) dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 97%, belum tercapainya target ini masih ada sebagian masyarakat yang belum merasa penting akan kepemilikan akta kelahiran karena bagi putra-putrinya yang berusia 0 - 17 tahun, mereka akan mengurus akta kelahiran jika sudah dibutuhkan.
3. Untuk indikator “Penerbitan akta kematian” tercapai sebesar 100% dari jumlah kematian yang dilaporkan pada tahun 2022 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto. Jumlah kematian yang dilaporkan oleh masyarakat dan RW sebanyak 1.397 dan semuanya telah diterbitkan akta kematiannya. Tercapainya target

ini dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto bekerjasama dengan petugas registrasi Desa/Kelurahan se-Kota Sawahlunto.

4. Untuk Indikator “Kartu Identitas Anak (KIA) ” tercapai sebesar 72.91% dari total jumlah penduduk 0-17 tahun kurang 1 hari 17.856 orang (data DKB II Tahun 2022 ) atau penduduk yang memiliki KIA sebanyak 13.018 orang. Pencapaian target tersebut dikarenakan telah turunnya tim ke sekolah - sekolah untuk mengsosialisasikan pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) sekaligus menjemput dokumen pengurusan KIA ke sekolah-sekolah.

Rincian target dan realisasi capaian sasaran strategis bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Sawahlunto

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		B	B	B	A	A	B	B	A	A	
2	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan sesuai dengan prioritas nasional		100	100	100	100	100	102,02	127,79	100	100	

### 2.3 Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Isu dan masalah mendesak dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto antara lain :

1. Pelayanan prima administrasi kependudukan yaitu pelayanan yang selalu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Dalam era saat ini pelayanan administrasi kependudukan mempunyai tuntutan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin maju antara lain :
  - a. Penduduk menginginkan pelayanan yang cepat, mudah dan tanpa biaya;
  - b. Perkembangan IT menuntut pelayanan untuk bisa menjadi lebih memudahkan masyarakat;

Diperlukan terobosan-terobosan baru untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam hal pelayanan administrasi;

2. Satu data kependudukan secara nasional. NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK berlaku dan melekat selamanya pada setiap penduduk dari lahir bahkan dibawa setelah meninggal dunia sehingga diperlukan NIK sebagai identitas tunggal administrasi.
3. Implementasi integritas big data kependudukan dalam proses pemerintahan di Indonesia telah berjalan sejak tahun 2019. Integrasi big data ini memudahkan dalam semua proses pemerintahan. Proses tersebut secara bertahap telah dilakukan oleh jajaran Dukcapil. Tidak hanya big data yang menjadi poin utama tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut yang terkoneksi dengan banyak lembaga dan instansi-instansi pelayanan publik.
4. Big data mendorong penduduk untuk mendapatkan hak-haknya dalam pelayanan publik.
5. Semua penduduk memiliki identitas salah satu hak penduduk diantaranya adalah setiap penduduk memiliki dokumen kependudukan. Dengan adanya dokumen penduduk tersebut maka hak-hak publik dalam pelayanan dapat terpenuhi dengan baik. Dengan adanya kemudahan dalam pelayanan diharapkan masyarakat memiliki semua dokumen kependudukan seperti KTP-el, KIA, KK, Akta pencatatan sipil serta dokumen kependudukan lainnya.
6. Administrasi kependudukan menuju Go-Digital
  - a. Implementasi Go Digital bertujuan mewujudkan pelayanan yang cepat dan membahagiakan masyarakat.
  - b. Mulai Tahun 2019 jajaran Dukcapil telah menggunakan tanda tangan digital untuk mengurus data adinduk.
  - c. Masyarakat bisa mengurus keperluan layanan adminduk seperti akta kelahiran, tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Cukup mengisi formulir online, tekan enter, dan data kependudukan yang diperlukan pun hadir sekejap mata. Bisa diprint out sendiri oleh penduduk dari rumah.

Dalam skala nasional, isu-isu penting bidang kependudukan yang berkaitan langsung dengan bidang administrasi kependudukan, diantaranya ;

1. Kepemilikan Akta Kelahiran untuk seluruh penduduk.
2. Kartu Identitas Anak (KIA)

Setiap warga Negara wajib memiliki identitas, selama ini pemberian identitas kependudukan baru diberikan kepada penduduk usia 17 tahun dan/atau telah menikah dengan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk. Untuk itu mulai tahun 2018 telah diterbitkan kartu identitas untuk penduduk dibawah 17 tahun berupa penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

3. Pemanfaatan SIAK.

- a. Perbedaan data kependudukan masih menjadi kendala dalam pengambilan kebijakan pembangunan, sehingga sistem informasi kependudukan perlu terus ditingkatkan kualitasnya agar dapat memberikan data dan informasi yang solid untuk kepentingan pembangunan.
- b. Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan yang boleh disebarluaskan kepada publik dan dimanfaatkan dalam proses pembangunan adalah Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung dengan Data Center Kemendagri dan telah dikonsolidasikan serta dibersihkan oleh Kemendagri.

4. Inovasi Pelayanan Publik

RPJM Nasional 2020-2024 mengamanatkan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten dan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang ditunjang oleh semakin berkembangnya teknologi informasi, maka inovasi baru dalam pelayanan publik harus terus dilakukan oleh PD penyelenggara pelayanan publik agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan semakin tinggi dan partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan juga meningkat.

**2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam hali ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tidak memiliki program/kegiatan yang di usulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kab/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kota Sawahlunto Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

**Tabel 2.3**  
**Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Kota Sawahlunto**

Nama Perangkat Daerah : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tugas bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat nasional berada pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka seluruh kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tidak terlepas dari kebijakan, program dan kegiatan Prioritas Tingkat Nasional.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri terutama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di implementasikan dalam keterkaitannya dengan Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 yang dirumuskan secara umum sebagai berikut :

**“Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)”**

Ini merupakan agenda prioritas pembangunan RPJMD Tahun 2020-2024 (PN7), dalam rangka pencapaian prioritas Nasional 7 (tujuh), Kementerian Dalam Negeri menetapkan 3 (tiga) tujuan, yang berkaitan dengan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah terdapat tujuan ke-2 (dua). ***“Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)”***. Untuk mewujudkan tujuannya pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis yaitu : ***“Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8)”***, dengan indikator sasaran strategis sebagai tolak ukur ketercapaian sasaran strategis, meliputi :

1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan Nasional untuk pelayanan publik (kumulatif).

Dengan arah kebijakan fokus pada ***“Pemanfaatan Database Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembanguna datacenter SIAK dan KTP-el di Ibu Kota Negara Baru”***. Program yang menjadi landasan penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020-2024 adalah yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, yaitu ***“Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil”***.

Dengan adanya kebijakan redesain program dan kegiatan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan sesuai arahan Bapak Presiden RI, maka Program Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula ***Program Penataan Kependudukan dan Pencatatan Sipil*** menjadi ***“Program Tata Kelola Kependudukan”***. Program ini merupakan program teknis dengan sasaran terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.

Untuk pelaksanaan program strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula diselenggarakan melalui 6 (enam) kegiatan dan berdasarkan sedesian kegiatan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan menjadi 3 (tiga) kegiatan strategis. Sedangkan untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya berubah menjadi Program Dukungan Manajemen. Adapun 3 (tiga) kegiatan strategis yaitu :

1. Pengelolaan, pemanfaatan Data Informasi Kependudukan;
2. Pembinaan Administrasi Kependudukan;
3. Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakab tersebut diimplementasikan dalam Rencana Strategis Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, yang untuk pencapaiannya tertuang dalam bentuk program dan kegiatan.

#### **TELAAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT**

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang mendukung visi dan misi Gubernur Sumatera Barat, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan visi

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat terpilih, visi pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut : ***“Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul Dan Berkelanjutan”***.

Kewenangan pemerintah Propinsi Sumatera Barat pada urusan bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilekatkan pada misi Gubernur Sumatera Barat nomor 7 (tujuh), yaitu ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”***

Tujuan yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Mewujudkan database kependudukan sebagai salah satu basis data pembangunan daerah;
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani

Sasaran yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatkan pemanfaatan data Kependudukan yang terintegrasi
2. Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen Kependudukan yang lengkap
3. Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat ada beberapa strategi yang akan dijalankan, diantaranya:

1. Peningkatan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pembinaan pelayanan pendaftaran penduduk di Kabupaten/Kota;
2. Peningkatan koordinasi fasilitasi, pengawasan dan pembinaan pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota
3. Meningkatkan sistem serta sarana prasarana pemanfaatan data berbasis teknologi dan informasi.
4. Meningkatkan penyajian dan pemanfaatan data kependudukan yang berkualitas.

Program yang mendukung agar tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, **Tujuan** adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan **Sasaran** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/perangkat daerah yang di peroleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Sawahlunto maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto menetapkan **Tujuan Organisasi** yaitu: “ **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat**”.

Untuk tercapainya tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, maka sasaran rencana kerjanya adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan.

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah dalam hal meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024 menargetkan mendapat nilai “ A “.

2. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan.

Sedangkan untuk mencapai sasaran ke dua pada tahun 2024 Dinas Dukcapil menargetkan tercapai 100% untuk masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan sesuai dengan prioritas nasional.

Target dari tujuan dan sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**Kota Sawahlunto**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2024	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Tertatanya dan terkelolanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas	Nilai SAKIP	62,19	
			Persentase Pelaksanaan Penataan & Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan	100	
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Terlaksananya Pelayanan Kependudukan yang berkualitas berbasis teknologi	Perekaman KTP elektronik (%)	99,60	
			Jumlah OPD yang memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama ( % )	100	
			Cakupan KTP (%)	99,60	
			Cakupan KK (%)	92,20	
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (%)	75,00	
			Persentase keluarga yang terlibat administrasi kependudukan (%)	99,90	
			Cakupan akte kematian (%)	100	
			Kepemilikan akta kelahiran (%)	98,05	
			Validitas data kependudukan (%)	100	
			Penyediaan Profil Kependudukan (Buku)	3	

### 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Guna mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, pada tahun 2024 telah merencanakan sebanyak 5 Program dan 15 Kegiatan dan 26 Sub kegiatan dengan pagu anggaran belanja operasional sebesar Rp. 4.916.732.033,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah ) pagu dana ini telah termasuk belanja Gaji ASN.

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Dinas Dukcapil mendapat suntikan Anggaran dari Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Non fisik Adminduk Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil RI. Namun mulai tahun 2022 Semua Program, kegiatan dan sub Kegiatan Anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD.

Penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut seluruhnya berada di Kota Sawahlunto. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3  
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Kota Sawahlunto

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	Rencana Tahun 2024		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Terselenggaranya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	Sawahlunto	62,19	4.505.129.978	DAU
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Dokumen	5.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		5 Dokumen	5.000.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)		99%	2.981.153.118	
	Sub Kegiatan Prmyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)		23	2.981.153.118	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	20.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang diadakan (Setel)		45	20.000.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	336.391.043	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Bulan)		12	3.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Bulan)		12	100.014.688	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (bulan)		12	20.875.950	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Bulan)		12	40.831.164	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bulan)		12	171.669.240	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)		90,00	183.020.479	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Jenis)		5	80.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Paket)		1	103.020.479	
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terselenggaranya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)		95,00	496.401.132	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bulan)		12	1.552.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Bulan)		12	108.673.572	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Orang)		18	386.175.060	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)		90,00	453.158.206	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Bulan)		14	128.598.026	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara (Bulan)		12	303.591.080	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipertah / direhabilitasi (Bulan)		12	20.969.100	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)		83,00	30.000.000	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan		15	30.000.000	

## Rencana Kerja Tahun 2024

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan KTP (%)	99,60	289.608.055
	Cakupan KK (%)	92,20	
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (%)	75,00	
	Perekaman KTP elektronik (%)	99,60	
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen kependudukan dan persentase pengaduan yang diselesaikan (%)	100	64.804.355
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	12	64.804.355
Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase blanko, Toner, Ribbon, cleaning Kit dan bahan-bahan lain yang disediakan	100	204.034.000
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	1	204.034.000
Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk (Laporan)	12	20.769.700
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	10	20.769.700
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase keluarga yang tertib administrasi kependudukan (%)	85,00	50.000.000
	Cakupan Akte kelahiran (%)	65,00	
	Cakupan akte kematian (%)	100	
	Kepemilikan akte kelahiran (anak usia 0-18 th yg sudah memiliki akte lahir) (%)	98,05	
Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggaraan Pencatatan Sipil (Laporan)	1	50.000.000
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	1	20.000.000
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1	15.000.000
Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1	15.000.000
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Validasi Data Kependudukan (%)	100	72.000.000
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (%)	100	
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Data Administrasi Kependudukan Yang Akurat	1	15.000.000
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	1	15.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (%)	100	57.000.000
Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan (Laporan)	1	15.000.000
TOTAL			4.916.732.033

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto di tahun 2024.

Tabel 4.1

Tabel 4.1  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024  
dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
Kota Sawahlunto

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aparatur yg telah mengikuti	Sawahlunto	90%	384.311.000	DAU		90%	231.375.000
	Kegiatan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian penyelenggaraan		100%	5.000.000			100%	5.500.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	5.000.000			5 Dokumen	5.500.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			90%	388.311.000			90%	225.875.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang disediakan		1 Unit	389.942.000			1 Unit	200.000.000
	Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 Unit	28.366.000				25.875.000
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			100%	84.121.500			100%	71.284.791
	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		12 Laporan	84.121.500			12 Laporan	71.284.791
	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk			100%	138.513.800			100%	97.034.063
	Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain blanko KTP-el, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		8 Dokumen	138.513.800			1 Dokumen	97.034.063
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			100%	23.250.000			100%	25.000.000
	Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Penduduk		10 Dokumen	23.250.000			10 Dokumen	25.000.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			100%	43.688.000			100%	62.500.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengaduan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengaduan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam		1 Laporan	20.028.000			1 Laporan	25.000.000
	Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Penduduk		1 Laporan	15.014.000			1 Laporan	17.500.000
	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil		1 Laporan	8.656.000			1 Laporan	20.000.000
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Data kependudukan yang diolah dan disajikan dan dimanfaatkan oleh OPD/instansi lainnya			3.581.000				3.300.000
	Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		1 Dokumen	3.581.000			1 Dokumen	3.300.000
	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				13.957.400				
	Sub Kegiatan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengaduan Agama Mengenal Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembanguan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengaduan Agama Mengenal Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembanguan Basis Data Kependudukan		1 Dokumen	13.957.400			1 Dokumen	
	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan				20.000.000				22.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota		3 Dokumen	20.000.000			3 Dokumen	22.000.000

<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah</b>			<b>2.945.130.740</b>			<b>3.279.268.430</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	23	2.645.130.740	24		3.279.268.430
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>34.419.000</b>			<b>31.690.000</b>
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45 Paket	14.400.000	45 Paket		15.525.000
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	20.010.000	15 Orang		15.525.000
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>175.575.450</b>		<b>100%</b>	<b>199.626.800</b>
Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.097.450	12 Paket		3.165.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.888.000	12 Paket		21.006.808
Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	19.159.000	12 Paket		19.665.000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	132.431.000	12 Laporan		155.250.000
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>32.332.520</b>			<b>80.000.000</b>
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	32.332.520	4 Unit		80.000.000
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>484.825.112</b>		<b>95%</b>	<b>494.548.937</b>
Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.552.000	12 Laporan		1.707.750
Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	106.446.680	12 Laporan		93.150.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	18 Laporan	356.826.452	12 Laporan		396.691.187
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>201.880.000</b>		<b>90%</b>	<b>264.015.724</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	127.486.000	14 Unit		133.068.956
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Unit	56.960.000	12 Unit		107.216.768
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diperbaiki/direhabilitasi	12 Unit	17.434.000			20.700.000
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>69.584.840</b>		<b>100%</b>	<b>72.450.000</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	69.584.840	12 Paket		72.450.000
<b>TOTAL</b>			<b>4.326.182.562</b>			<b>4.930.453.553</b>

**BAB V  
PENUTUP**

**A. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja**

Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah serta sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang administrasi kependudukan, dimana program adminduk merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Akta Pencatatan Sipil,

Pengelolaan Informasi Kependudukan dan hasilnya digunakan untuk peningkatan pelayanan publik serta kegiatan pembangunan sektor lainnya. Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dalam berbangsa dan bernegara terutama dari aspek kepastian status hukum warganya dan informasi data kependudukan sebagai data statistik dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di segala aspek kehidupan terutama aspek pendidikan, aspek ekonomi dan aspek keamanan. Untuk itu maka terhadap rencana kerja tahun ini perlu kajian dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus untuk mengakomodasi dinamika yang senantiasa berkembang di masyarakat.

**B. Kaidah-kaidah pelaksanaan**

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto maka rencana kerja tahunan yang dibuat harus berorientasi pada norma aturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta memiliki visi ke depan yang hasil akhirnya dapat diukur dengan jelas dan pasti .

Di dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) di upayakan agar terjadi sinkronisasi dan sinergitas antar program, kegiatan dan sub kegiatan. Dengan

berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kota, dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto.

**C. Rencana Tidak Lanjut**

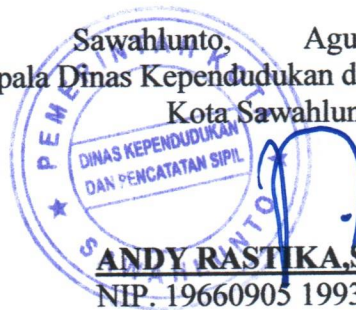
Kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada untuk melaksanakan tugas pelayanan prima perlu ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan teknologi informatika melalui bimbingan teknis, pelatihan dan kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja pelayanan publik. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang. Hal ini berakibat tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai berimbang.

Sementara itu, untuk mengatasi kekurangan jumlah pegawai tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto telah dibantu oleh Pegawai Non ASN yang Berjumlah 18 orang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto melaksanakan kegiatan pelayanan keliling dikantor desa, pelayanan *door to door*, Mall Pelayanan Publik( MPP), dan perekaman sekolah-sekolah.

Untuk suksesnya kegiatan Pelayanan dimaksud kami juga telah diberikan kendaraan operasional oleh PT. BA melalui program CSR PT. BA berupa kendaraan Dinas Roda 4 yang dilengkapi dengan peralatan perekaman dan pencetakan KTP elektronik, KIA dan dokumen kependudukan lainnya pada awal tahun 2023.

Demikian Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 yang kami buat dan semoga dapat menjadikan dokumen perencanaan yang bermanfaat sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang berbasis SIAK online di tahun 2024.

Sawahlunto, Agustus 2023  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Sawahlunto,



**ANDY RASTIKA,SH, MM**  
NIP. 19660905 199308 1 001